

**TINJAUAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN USUL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN  
OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum ( S.H) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau**



**OLEH :**

**PRIMA PUTRA ARDIANSYAH**  
**NIM: 10727000410**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2012**

## ABSTRAK

Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan terhadap pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang ”.Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan daerah utusan golongan keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi MPR yang diangkat, tetapi dibentuknya sebuah lembaga negara yang baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Diperlukan Lembaga Negara Yang Menjembatani Kepentingan Pusat Daerah, serta memperjuangkan kepentingan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam kebijakan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa DPD sebagai Lembaga Perwakilan Daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi Legislasi, Fungsi Pertimbangan dan Fungsi Pengawasan.

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1.Bagaimana Mekanisme Pengajuan Usul rancangan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009. 2.Apa Hambatan yang terjadi dalam pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009

Ada pun Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atas azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap azas-azas Hukum dan sistematika hukum. Jika dilihat dari penelitiannya, penulis melakukan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

DPD segera berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR. Salah satu di antaranya, pengaturan mekanisme penolakan atau penerimaan suatu RUU usul DPD atau pertimbangan DPD kepada DPR harus diatur dengan detail terkait persyaratan, jenis masalah, dan standar penilaian yang bisa menjadi alasan DPR menolak usul DPD.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari fungsi DPD yang salah satunya dapat mengajukan usulan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, sekiranya hal ini dapat membantu kinerja dari Lembaga Negara DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), agar Fungsi tersebut dapat berjalan lancar DPR juga membaerikan jalan yang mudah Kepada DPD agar kinerja dari sebuah lembaga ini berjalan dengan maksimal serta merubah persepsi yang telah beredar saat ini bahwa DPD hanya sebagai teras dan tidak bisa masuk kedalam, selain itu kepentingan yang harus di akomodasi adalah persoalan hubungan keduanya antara lembaga perwakilan, yakni persoalan pengaturan mekanisme penolakan dan penerimaan RUU usulan DPD atau pertimbangan DPD kepada DPR, terkait itu, DPD segeralah berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas Legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR..

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistmatika Penulis.....	10

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	11
B. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah(DPD).....	13

### **BAB III : TINJAUAN UMUM**

A. Teori Pembentukan perundang-undangan .....	17
B. Teori perwakilan.....	24

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Mekanisme Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Otonomi Daerah menurut Undang Undang No 27 tahun 2009.....	32
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang menurut undang-undang No 27 tahun 2009 .....	54

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gerakan pada pertengahan tahun 1998 menjadi salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai suatu bangsa yang menjadi petanda penyesuaian struktur-struktur bangsa dan bernegara dengan perubahan zaman dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Masa transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan salah satu tahapan yang menjadi fase penting perkembangan Indonesia. Salah satu tahapan yang menjadi bagian dari proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah di bidang ketatanegaraan diantaranya mencakup proses perubahan konstitusi Indonesia yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup>

Salah satu perubahan penting setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang dasar 1945 adalah perubahan terhadap pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Majelis permusyawaratan rakyat terdiri dari atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang ”.

Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan daerah golongan keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi MPR yang diangkat, tetapi dibentuknya sebuah lembaga negara yang baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi

---

<sup>1</sup> Jhon Pieres, Aryanti Baramuli Putrid, *Studi analisis, kritik dan solusi kajian hukum politik*, Jakarta, Pelangi Cindekia: 2006, h.xiv

daerah, diperlukan lembaga negara yang menjembatani kepentingan pusat daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasikan aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu yang ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu.<sup>2</sup>

Dimensi otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan terlaksananya keadilan, demokratisasi, dan transparansi kehidupan sektor publik, hal ini tentunya suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Paradigma baru pemerintah daerah memberikan kewenangan luas bagi daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab publik pemerintahan daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Kesemuanya ini di laksanakan secara demokratis, transparan dan egalite, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi dari Bhineka Tunggal Ika. Dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat *massal, uniform, dan sentralistis*, harus dieliminasi.<sup>3</sup>

Tahun 2004 adalah era baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia terutama di bidang perwakilan rakyat yaitu adanya anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang sebelumnya tidak pernah ada. Mereka telah dipilih dalam Pemilu 2004 ini bersama dengan pemilihan anggota DPR.

Berdasarkan hasil amandemen keempat ada perubahan mendasar yang berkenaan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana semula MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah utusan golongan, menjadi MPR terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1) UUD Tahun 1945

Keberadaan DPD dalam Parlemen sebagai institusi baru, yang sebelumnya lembaga ini diisi oleh Dewan Utusan Daerah (DUD) dan utusan golongan. Mekanisme pengisiannya berbeda, dimana untuk utusan golongan dan utusan daerah lebih mudah karena DUD dipilih oleh DPRD Propinsi dan utusan golongan diangkat.

Perubahan ini menjadikan sistem badan perwakilan di Indonesia berubah dari sistem monocameral ke sistem bicameral, bahwa sistem bicameral yang diselenggarakan di Indonesia berbeda dengan sistem bicameral negara-negara lain.<sup>4</sup>

Gagasan dasar pembentukan DPD selanjutnya dijabarkan ke fungsi, tugas dan wewenang DPD sebagaimana di rumuskan dalam pasal 223 Undang-

---

<sup>3</sup> Dr.J.kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta, Rhineka cipta, 2007, h.58

<sup>4</sup> Sulardi, " *Aspek Hukum Sistem Bikameral di Indonesia* ", Jakarta Surya cipta, 2002, h.67

Undang no 27 pasal 223 ayat (1) tahun 2009 yang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dan presiden republik indonesia disebutkan bahwa DPD mempunyai fungsi: “(a) pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;(b) ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; (c) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan (d) pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.”<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 pasal 223 ayat (1) tahun 2009 tersebut, kita dapat mengetahui bahwa DPD sebagai lembaga perwakilan Daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang no.27 pasal 223 ayat (1) tahun 2009.Tentang pengajuan usul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah



Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu hanyalah sebagai *co-logislator* di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sifat tugasnya hanya menunjang (*auxiliary agency*) terhadap terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Padahal persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat dari pada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak di imbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (*regional representatives*).<sup>6</sup>

Berangkat dari fungsi DPD penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dari sisi normatif dalam bentuk karya ilmiah dengan judul.

**“Tinjauan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Otonomi Daerah.”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah di pahami, maka penulis membatasi penelitian ini mengenai tinjauan tinjauan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang pengajuan usul rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

---

<sup>6</sup>Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* ,jakarta,PT Bhuana ilmu populer,;2007 h.189

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan usul rancangan Undang-Undang menurut undang-undang No 27 Tahun 2009 ?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pengajuan usul rancangan Undang-Undang menurut undang-undang No 27 tahun 2009

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) untuk mengetahui mekanisme dalam pengajuan usul Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b) untuk mengetahui kendala atau hambatan yang terjadi dalam pengajuan usul rancangan Undang-Undang.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a) untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan tata negara pada khususnya terutama terhadap fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang pengajuan usul rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peniliti berikutnya khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang

sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

- c) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap perguruan tinggi yaitu memenuhi persyaratan dalam memepuh ujian sarjana hukum.
- d) Untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan dan sumbangsih penulis terhadap almamater.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>7</sup> Menurut soerjono soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang di lakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarakan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum *normatif*, yaitu penelitian yang di lakukan atas azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>9</sup> Adapun dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap azas-azas

---

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka cipta, 2006),h.2

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada),2001,h.13

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*,(jakarta: PT. raja grafindo persada, 1997),h.41

hukum dan sistematika hukum. Jika dilihat dari penelitiannya, penulis melakukan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut.

## **2. Subjek Dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai Undang-Undang No 27 pasal 223 tahun 2009 tentang pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tertier.

### **a) Bahan hukum primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang dasar 1945
2. Undang-Undang nomor 27 Pasal 223 ayat (1) tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai data primer, berupa buku-buku hukum, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.**

- c) Bahan hukum tertier, berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengajuan usul rancangan undang – undang.<sup>10</sup>

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan di mulai dari faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.

#### **6. Metode Penulisan**

- a) Metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b) Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>10</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*:(jakarta,rhineka cipta 2002),hal 158

## **F. Sistmatika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

BAB I : Proposal terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis, Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

BAB III :Tinjauan Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teori perwakilan.

BAB IV : Hasil penelitian atau pembahasan Bagaimana mekanisme pengajuan usul rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apa hambatan yang terjadi dalam pengajuan usul rancangan Undang-Undang tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI



selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.<sup>1</sup>

Berkembangnya usulan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendesak MPR segera melakukan inisiatif amandemen UUD 1945 hasil amandemen ke empat, khususnya menyangkut pasal 22 C dan 22 D mengenai eksistensi DPD menarik untuk dikaji lebih mendalam. Beberapa anggota DPR mereaksi usulan amandemen UUD yang digagas DPD akan menciptakan gelombang tuntutan perubahan pada pasal-pasal lain. Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan gagasan amandemen UUD terkait status konstitusional DPD yang dinilai lemah. Substansi amandemen tersebut terkait dengan realitas politik pasca-amandemen UUD 1945 yang menempatkan DPD pada posisi yang dianggap lemah dibandingkan dengan posisi politik DPR. Oleh anggota DPD, pasal tentang DPD kurang memberi kewenangan politik DPD untuk terlibat dalam proses legislasi dengan DPR dalam konteks pembahasan dan pengesahan RUU. Anggota DPD merasa termarginalisasi politik dalam berhadapan dengan DPR, karena kewenangan politik DPD terbatas pada persoalan otonomi daerah, pemekaran daerah, SDA daerah dan hubungan antara pusat dengan daerah.

---

<sup>1</sup>[http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika Dewan Perwakilan Daerah](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Daerah).

Begitu pula dalam UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pasal 42, 43, dan 44, kewenangan DPD dinilai para anggotanya cenderung terbatas sebagai lembaga konsultatif yang hanya memberikan masukan serta pertimbangan kepada DPR dalam pengusulan RUU. Dengan kata lain, eksistensi politik DPD secara konstitusional setara dengan DPR sebagai lembaga perwakilan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun secara politik riil, proses -proses legislasi lebih didominasi DPR. Keadaan demikian memunculkan wacana dari kalangan anggota DPD untuk mengajukan usulan kepada MPR agar melakukan amandemen pasal 22 UUD 1945, guna memperkuat peran politik DPD sebagai perwakilan politik yang memperjuangkan permasalahan daerah.<sup>2</sup>

## **B. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah(DPD)**

Tugas dan wewenang Deewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD. Berikut:<sup>3</sup>

Pasal 224

(1) DPD mempunyai tugas dan wewenang:

A. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

---

<sup>2</sup> [Saldiisra.web.id](http://Saldiisra.web.id), menuju bikameral efektif dalam rangka memperkuat fungsi legislasi DPD, h.5

<sup>3</sup> Undang-undang No 27 tahun 2009.

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- B. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- C. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf
- D. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
- E. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,  
  
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
- F. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan,

dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

G. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK

H. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pilihannya.

#### Pasal 225

1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam menyusun program dan kegiatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
- 3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan.



### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pembentukan Peraturan-Undangan**

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Pertama, tahap persiapan ini menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan sebuah peraturan perundang-undangan. Karena terdapat berbagai jenis bentuk peraturan perundang-undangan, dimana setiap jenisnya mempunyai spesifikasi kewenangan legislasi (pembuatan peraturan) yang berbeda-beda, maka perlu dijelaskan satu persatu sesuatu dengan hirarki jenis/bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, tahap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. dalam tahap ini dapat dilihat lebih rinci di lampiran UU No. 10 tahun 2004. Akan tetapi dalam lampiran tersebut hanya menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya mengenai Peraturan Daerah terdapat aturan tersendiri. Ketiga, Tahap Pengundangan sangatlah penting bagi sebuah peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya pengundangan ini sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Saifudien dj,sh,*ilmu perundang-undangan*,(jakarta,blogger,2007) h.3

Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahap perencanaan peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Oleh karena itu, untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

#### 1. Proses Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan

A. Undang-Undang (UU) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati *.ilmu perundang-undangan*, (jakarta, PT bhuana ilmu populer,2007),h.23



undang-undang baik dari DPR atau DPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemrakarsa. Masukan dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok materi yang diusulkan. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

C. Peraturan Pemerintah Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II tentang Penyusunan Undang-Undang.

D. Peraturan Presiden Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II tentang Penyusunan Undang-Undang.

E. Peraturan Daerah (Perda) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota kemudian disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota.

## 2. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas, Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen. Keanggotaan Panitia Antardepartemen terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang. Panitia Antardepartemen dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa. Panitia Antardepartemen penyusunan Rancangan Undang-Undang dibentuk setelah Prolegnas ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan

Rancangan Undang-Undang yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden.

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Dalam rangka penyusunan konsepsi Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas, Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi tersebut kepada Menteri dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Kemudian Menteri mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang bewenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga Pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Apabila dipandang perlu, koordinasi dapat pula melibatkan perguruan tinggi dan atau organisasi.

Yang dimaksud dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disini adalah teknik atau susunan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. hal ini dijelaskan dalam lampiran UU No. 10 Tahun 2004. Secara garis besar susunan dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

#### A. JUDUL

#### B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans

4. Dasar, Hukum

5. Diktum

### C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

### D. PENUTUP

E. PENJELASAN (Jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

Sedangkan rincian dari pointer di atas dapat dilihat pada lampiran UU No. 10 tahun 2004 karena begitu banyaknya spesifikasi atau rinciannya. Khusus untuk proses penyusunan produk hukum daerah mempunyai aturan tersendiri yang diatur dalam PMDN No.16 tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah. Selain itu penyusunan produk hukum daerah juga dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan. Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dibentuk tim asistensi dengan sekretariat berada pada Biro Hukum atau Bagian Hukum.

### 3. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan.

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan dalam Suatu Lembaran Negara (LN) atau Berita Negara. Dan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. istilah Pengundangan atau Afkondiging atau Promulgation dapat berarti juga Publicate atau Publication. Yang dimaksud pengundangan di sini adalah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan perlunya suatu pengundangan adalah *een eider wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) atau *ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man* (ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya). Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam;

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.

## **B. Teori Perwakilan**

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.<sup>3</sup> lahirnya lembaga perwakilan rakyat dimulai pada zaman Yunani kuno, dimana Rousseau tetap menginginkan berlangsungnya demokrasi, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambah jumlah penduduk, dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan, maka keinginan Rousseau tersebut terealisasi, maka munculah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan jenisnya tidak sama di semua negara yang biasa disebut parlemen, atau kadang-kadang biasa disebut dewan perwakilan rakyat. Parlemen lahir bukan karena ide demokrasi itu, akan tetapi sebagai suatu kelicikan dari suatu sistem feodal.

Parlemen diciptakan dengan tujuan tertentu antara lain untuk menghubungkan masyarakat luas dengan raja atau pimpinan pemerintahan. Parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia 1997, h.75

akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok, yakni, menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik dan kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat. Fungsi utama parlemen dengan demikian adalah sebagai lembaga penghubung dan pengelolah konflik.<sup>4</sup>

Sebagian besar parlemen disebut sebagai lembaga atau badan perwakilan karena anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negaranya. orang-orang yang dipilih oleh warga negara, demikian di harapkan untuk menjadi wakil mereka dalam badan perwakilan masyarakat tersebut. Itulah sebabnya parlemen lebih sering disebut sebagian badan perwakilan atau badan yang mewakili para pendukung anggota-anggotanya secara resmi dalam system pemerintahan.<sup>5</sup>

Dalam keputusan kebanyakan berpendapat bahwa demokrasi perwakilan harus di anggap sebagai suatu model pembentukan keputusan yang mandiri. Lebih dari dari itu perwakilan di anggap sebagai suatu bagian penting dari keseluruhan proses politik. Unsur penting, karena di sebabkan adanya perwakilan maka terjadi suatu pemisah yang nyata antara yang meminta dan yang menawarkan. Dalam demokrasi musyawarah dan demokrasi referendum, maka setiap orang adalah yang meminta dan sekaligus yang menawarkan. Dalam demokrasi perwakilan maka perorangan-perorangan terspesialisasi dalam peranan sebagai yang meminta ataupun yang menawarkan. Dalam suatu demokrasi perwakilan

---

<sup>4</sup> Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta: 1995, h.37

<sup>5</sup> *Ibid*, h.38

para peminta adalah warga tanpa jabatan. Mereka menghendaki pelayanan pemerintah (barang-barang kolektif, penyerahan pendapat) dan untuk itu bersedia membayar suatu harga tertentu.<sup>6</sup>

Di dalam demokrasi perwakilan terdapat jenis-jenis perwakilan model perwakilan serta tingkat response parlemen terhadap harapan masyarakat.<sup>7</sup>

#### 1. Jenis-jenis perwakilan

- a. Perwakilan geografis. Secara umum badan perwakilan mengandung arti bahwa setiap anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh bangsa. Sehingga wajar jika masyarakat luas mengharapkan agar parlemen mewakili kepentingan mereka. Namun , dalam kenyataan setiap anggota parlemen hanya mewakili kelompok yang benar-benar di wakili di parlemen dan mengesampingkan kepentingan kelompok lain.
- b. Perwakilan partai. Dalam system parlemen lainnya partai politik merupakan jenis perwakilan yang terkemuka. Khususnya dalam system-sistem politik dalam mana disiplin terhadap partai politik sangat tinggi. Dalam system semacam ini partai politiklah jenis perwakilan paling pokok. Partai politik mengendalikan proses rekrutmen anggota serta kegiatan legislative di parlemen.
- c. Perwakilan lainnya adalah perwakilan kelompok kepentingan khusus. Kepentingan kelas menengah pernah menjadi alasan

---

<sup>6</sup>J. Van den Doei, *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, erlangga, Jakarta: 1988, h.90

<sup>7</sup> Bambang cipto, *op.cit.*, h.38



untuk membentuk perwakilan kelas tersebut dalam tubuh parlemen di Jerman. Di Amerika dikenal beberapa senator dengan kepentingan khusus seperti minyak, gandum maupun katun sehingga muncul istilah unik, antara lain, senator minyak. Namun secara umum kegiatan *lobbying* memungkinkan keterlibatan beraneka macam kepentingan dalam proses legislative.

## 2. Model perwakilan

Dalam perspektif hubungan antara anggota parlemen dan masyarakat yang diwakili sering timbul persoalan apakah seorang tersebut sekedar sebagai “utusan” ataukah sebagai seorang “wakil”. Jika sebagai seorang utusan, maka seorang anggota parlemen dengan sendirinya haruslah tunduk pada kehendak dari kelompok yang mengutusinya. Sebaliknya, jika seorang wakil, maka ia haruslah dapat memutuskan sendiri pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi kelompok yang diwakilinya.

## 3. Tingkat responsi anggota parlemen

Setiap anggota parlemen manapun sudah tentu diharapkan oleh para pemilihnya untuk memenuhi kehendak mereka, memberikan pelayanan serta memberikan berbagai kepuasan lain sekalipun hanya bersifat simbolik. Dalam usaha mereka menjalankan tugasnya sebagai wakil para pemilih tidak jarang terjadi perbedaan antara pendapat umum yang berkembang di luar gedung parlemen dan pemilihan suara yang dilakukan oleh para wakil rakyat di parlemen, mengenai isu tersebut. Untuk persoalan mendasar dan

sarat kepentingan para wakil yang terwujud dalam bentuk pemilihan terhadap keserasian. Namun persoalan –persoalan yang kurang dikenal oleh warga negara biasa seperti urusan luar negeri maka tidak jarang antara pendapat umum dan pendapat wakil berbeda. Artinya, jika di lakukan pemilihan suara untuk intervensi negara keluar negeri, misalnya. Maka pemilihan tersebut tidak selalu mencerminkan pendapat umum.<sup>8</sup>

Lembaga perwakilan rakyat, seperti yang tersebut dalam kepustakaan mempunyai dua padanan terminologi yang berbeda, yaitu parlemen atau legislatif. Kedua terminology itu sebetulnya mempunyai konotasi yang sama, yaitu sebagai tempat para wakil rakyat yang menyapaikan aspirasinya dan kehendak rakyat. Perbedaanya hanya terletak pada pemakaian terminologinya yang di gandengkan dengan system pemerintahan yang di anut sebuah negara. Negara yang menganut system pemerintahannya parlementer lembaga perwkilan rakyatnya di sebut parlemen sedangkan negara yang sistem pemerintahanya presidensil di sebut legislatif.<sup>9</sup>

Konsep lembaga perwakilan rakyat di Indonesia memang unik karena adanya MPR yang memiliki fungsi “super”, namun tidak bekerja sehari-hari, dan ada pula DPR yang memegang fungsi legislative rutin. Sejak perubahan keempat UUD 1945 tersebut, konsep lembaga perwakilan rakyat Indonesia berubah menjadi serupa dengan parlemen bicameral (dua kamar), di mana, selain DPR, di kenal pula DPD sebagai lembaga legislative. Namun, masih saja ada keunikan, yaitu dengan tetap di akuinya MPR

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal.43

<sup>9</sup> Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Focus media, Bandung, h.67

sebagai lembaga tersendiri sehingga seakan-akan ada tiga lembaga perwakilan.<sup>10</sup>

DPD lahir dari hasil amandemen keempat UUD 1945. Berbagai factor menjadi pertimbangan di hapusnya dua kamar lainnya di MPR yaitu utusan daerah dan utusan golongan (selain DPR). Pertama, transisi demokrasi dan reformasi melahirkan keleluasaan daerah untuk menjadi lebih otonom bahkan di bakukan dalam undang-undang. Kedua, utusan daerah selama ini di anggap kurang aspiratif terhadap kepentingan daerah karena mekanisme keanggotanya adalah di tunjuk dan bukan dipilih. Ketiga, konsep dua kamar yang di harapkan akan menjadi penyeimbang antara DPR dan DPD.

Ketentuan undang-undang dasar 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk:<sup>11</sup>

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan republic Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah.
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

---

<sup>10</sup> T.A. Legowo, *loc.cit*, h.134

<sup>11</sup> MPR RI “*panduan dalam memasyarakatkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*”. *latar belakang, proses dan hasil perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*. sekretariat jendral MPR RI 2003, hal.180 dalam jhon pieris, op cit h.42

Dalam pasal 33 undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD, di sebutkan bahwa (1) anggota DPD dari setiap provinsi di tetapkan sebanyak empat orang, (2) jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih 1/3 dari jumlah anggota DPR, (3) keanggota DPD diresmikan dengan keputusan presiden, (4) anggota DPD berdomisili di daerah pemilihanya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara republic Indonesia.

Fungsi DPD terkait erat dengan system checks and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia, yang diatur dalam pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945, yaitu:<sup>12</sup>

1. Dapat mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat daerah; pembentukan, pemekaraan, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan dareah; serta memberikan pertimbangan kepada Dwan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22D

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada dewan perwakilan rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.

Berdasarkan fakta yuridis dan penelusuran pemikiran-pemikiran yang berkembang mengenai fungsi DPD, perlu dipahami beberapa teori tentang demokrasi hukum, konstitusi dan kekuasaan yang terkait dengan DPD sebagai lembaga negara atau sebagai salah satu kamar penting dalam system bikameral.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jhon pieris, op.cit., h.46

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-**  
**UNDANG NO 27 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN USUL**  
**RANCANG NUNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN**  
**DENGAN OTONOMI DAERAH**

**A. Mekanisme Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Otonomi Daerah Menurut Undang Undang No 27 Tahun 2009**

Tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah di atur dalam UUD no 27 tahun 2009 yang tertera dalam pasal 240, yaitu tugas DPD dan alat kelengkapannya. kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilatarbelakangi tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Tuntutan kehadirannya membuat MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni DPD perubahan ketiga UUD 1945 pada agustus 2001.<sup>1</sup>

Adapun dasar pertimbangan teoritis kehadiran DPD antara lain untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) antara cabang kekuasaan negara dan lembaga legislatif itu sendiri. Selain itu, DPD diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan

---

<sup>1</sup> Indra j. Piliang, Bivintri Susanti, *Untuk Apa DPD RI, Kelompok DPD RI Di MPR RI*, jakarta: 2007. h. 67

kepentingan daerah-daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; meneguhkan persatuan dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan berbagai persoalan kedaerahan;
2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan daerah-daerah perumusan kebijakan nasional;
3. Serta mendorong percepatan demokrasi,
4. Pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan,
5. Kesenjangan dan kesetaraan

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan membawa angin segar dalam perkembangan otonomi daerah yang mana Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai fungsi yang tertera dalam UU No 27 Tahun 2009 yaitu:<sup>2</sup>

- a) Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b) Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

---

<sup>2</sup>[www.parlemen.net.com](http://www.parlemen.net.com), (terakhir di kunjungi tanggal 2 maret 2012)

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- c) Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
- d) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Salah satu dari fungsi Dewan Perwakilan Daerah Terkait dengan pengajuan usul rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, sesuai Mekanisme pengajuan RUU dari DPD yang diatur dalam Pasal 42 UU Susduk sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Susduk, Pasal 42



- 2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
- 3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi dewan perwakilan daerah (DPD) itu hanyalah sebagai co-legislator di samping dewan perwakilan rakyat (DPR). Sifat tugasnya hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Padahal persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat dari persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives).<sup>4</sup>

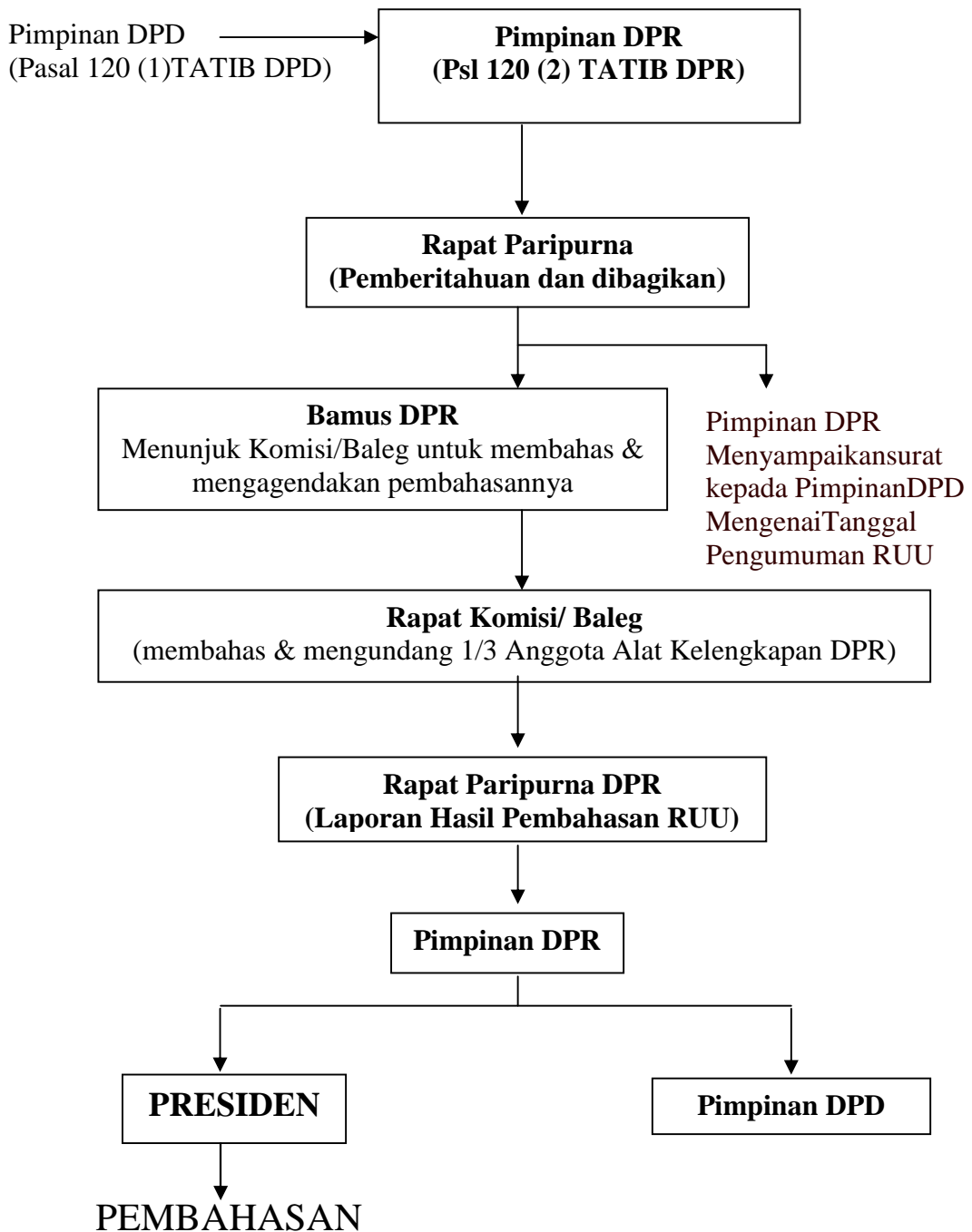
---

<sup>4</sup>Jimly Assididzie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuna ilmu populer, Jakarta :2007

Untuk lebih jelas dapat digambarkan melalui sketsa berikut ini:

**a. PENYUSUNAN/PENGAJUAN RUU DARI DPD**

Prosedur Pengajuan RUU dari DPD



**a) Proses Prosedur Pengajuan RUU dari DPD**

1. Sebelum RUU di ajukan kepada DPR RUU tersebut di rangakai oleh DPD bersama alat kelengkapan yang lain, pasal 237 yaitu panitia musyawarah, yang merancang RUU kemudian RUU Proses Pembahasan RUU dari DPD RI di DPR RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD (pasal 120 (1) TATIB DPD) kepada Pimpinan DPR (pasal 120 (2) TATIB DPR),
2. Kemudian Rapat Paripurna berikutnya,rapat paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul DPR atau tidak. Keputusan diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Keputusan dapat berupa :

- a. Persetujuan tanpa perubahan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan

Dari tiga kemungkinan keputusan penerimaan RUU usul DPR, keputusan (a) pertama relatif dapat dimengerti. (b) kedua,setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.

3. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota dalam Rapat Paripurna.
4. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU.
5. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
6. RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.(c) ketiga, RUU ditolak Pada kenyataannya, apabila suatu RUU ditolak oleh DPR untuk menjadi usul inisiatif, tidak ada pengaturan apakah RUU tersebut dapat diajukan lagi pada masa persidangan tersebut.<sup>5</sup>

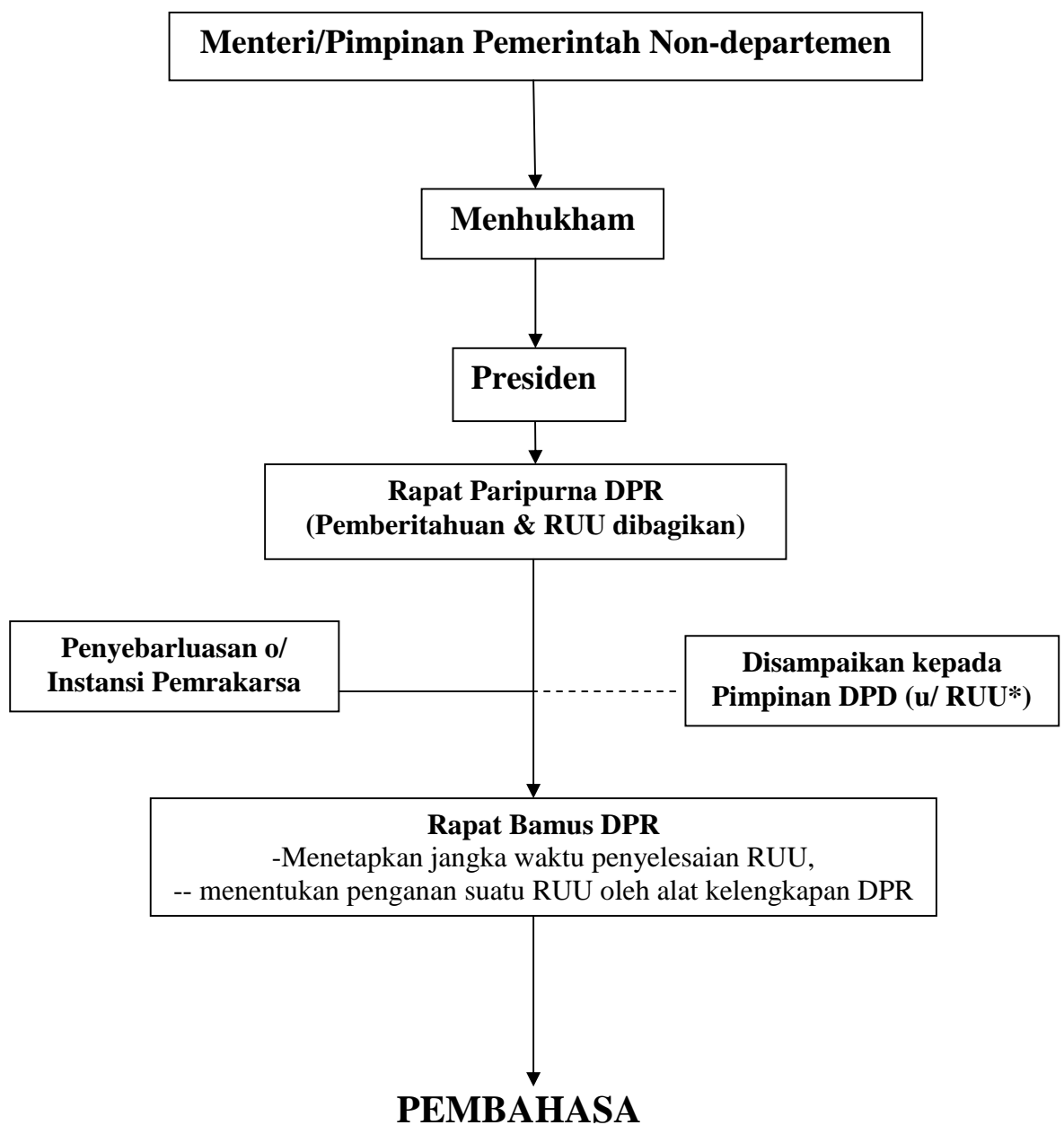
---

<sup>5</sup>PHSK,” *pusat studi hukum dan kebijakan indonesia*”,(terakhir di kunjungi tanggal 3 maret 2012) h.86

Kemudian penulis juga menggambarkan pengajuan RUU dari pemerintah sebagaimana tergambar pada skema berikut ini:

#### **b. Prosedur Pengajuan Ruu Dari Pemerintah**

UU 10 tahun 2004; Perpres No. 68/2005 Tentang  
Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPERPU, RPP RPERPRES

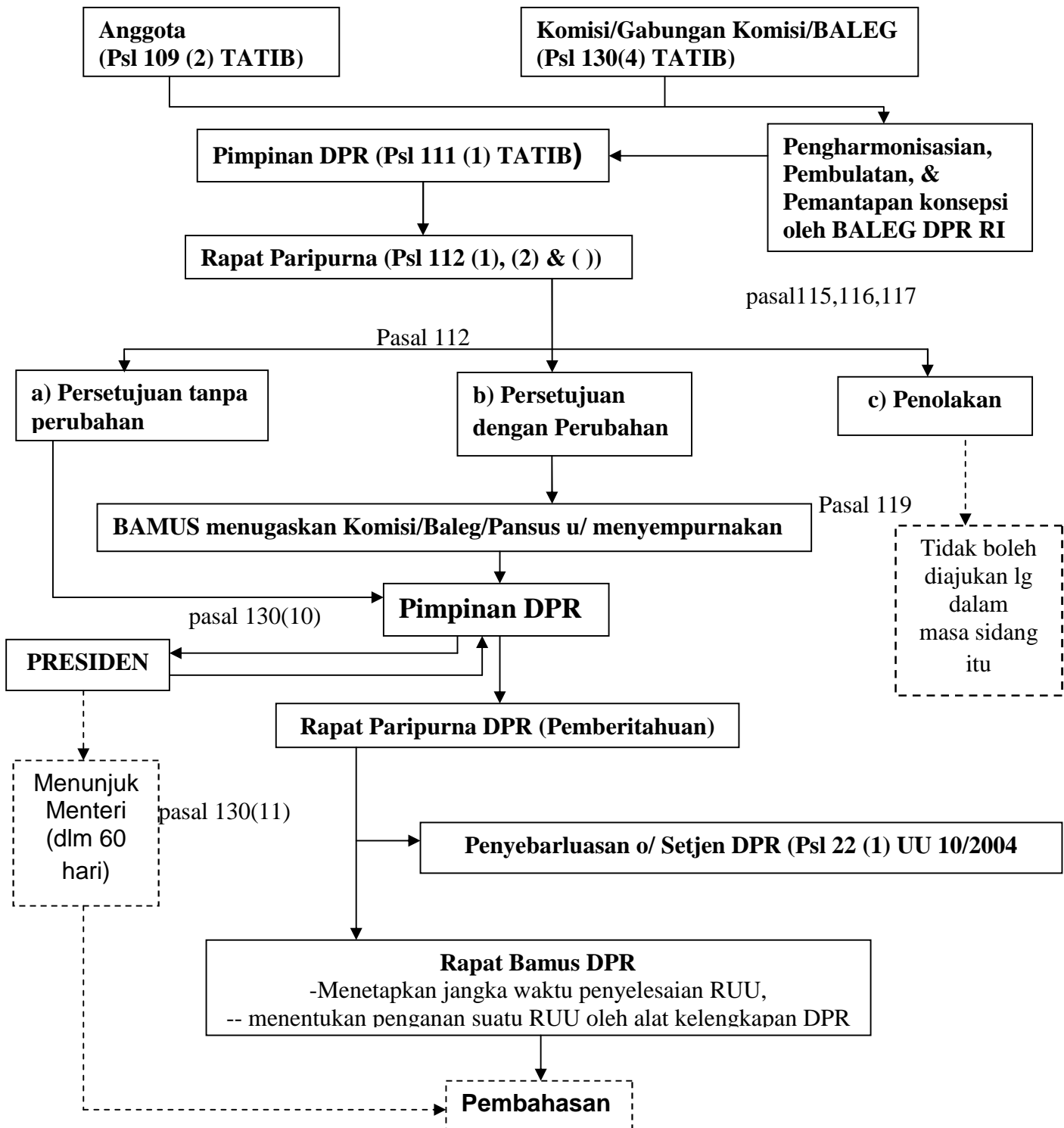


#### **b) Pengusulan RUU dari Pemerintah**

1. RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR melalui prosedur yang layak dengan Surat Pengantar Presiden dengan menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
2. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
3. Pimpinan DPR menyampaikan RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul kepada media massa, dan pimpinan DPD jika itu di berkaitan dengan otonomi daerah, Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat.
4. Rapat bamus DPR yaitu menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU dan menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR.
5. RUU yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat I berakhir. dan apabila ada kesalahan RUU bisa rubah sebelum berlanjut ke pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan.
6. Pembahasan, dilakukan setelah semua ranngkaian kerja telah diatur oleh anggota DPR dan bisa di lanjutkan oleh beserta RUU dari pemerintah/presiden, dari DPR, dari DPD di gabungkan.

Sebagai bahan perbandingan penulis juga menggambarkan pengajuan RUU dari DPR sebagaimana tergambar pada skema berikut;

### Prosedur Pengajuan RUU dari DPR



**c) Pengusulan RUU dari DPR**

1. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang.
2. Usul RUU dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dengan memperhatikan program legislasi nasional.
3. Pengharmonisasian, Pembulatan, & Pemantapan konsepsi oleh BALEG DPR RI sebelum RUU diberikan kepada pimpinan DPR.
4. Usul RUU beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
5. Selanjutnya dari hasil rapat terdapat 3(tiga) kemungkinan RUU yaitu:
  - a. Persetujuan tanpa, yaitu persetujuan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tanpa perubahan disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) (mengenai otonomi daerah).



- b. Persetujuan dengan, yaitu persetujuan dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tersebut.
  - c. Penolakan yaitu apabila rancangan Undang-Undang di tolak maka tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang itu.
6. Rapat paripurna berikutnya setelah usul RUU tersebut diterima oleh pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada anggota masuknya usul RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
7. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Setelah RUU di terima dan di sebarluaskan selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah (bamus) oleh DPR untuk menetapkan jangka waktu penyelesaian RUU, dan menentukan penganan suatu RUU oleh alat kelengkapan DPR yang terdiri dari atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang di perlukan.<sup>6</sup>

Keterangan: Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU belum dibicarakan dalam Bamus. Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul RUU tersebut belum diputuskan

---

<sup>6</sup> Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2005

menjadi RUU oleh rapat paripurna. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

Proses penyusunan rancangan undang-undang sampai dengan pembahasan di dewan perwakilan rakyat ialah sebagai berikut:<sup>7</sup>

a) Bagaimana lahirnya undang-undang

Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (Presiden beserta jajaran kementriannya) dan legislatif (DPR).

b) Perencanaan

Kita tentu bertanya dasar apa yang digunakan oleh DPR dan presiden untuk menentukan Rancangan Undang-undang (RUU) apa saja yang akan dibahas pada suatu periode tertentu. Sejak tahun 2000, DPR dan pemerintah telah menuangkan indikator program mereka dalam apa yang disebut dengan Program Pembangunan Nasional (Undang-undang NO. 25 tahun 2000). Di dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) itu terdapat indikator pembangunan bidang hukum, salah satu indikatornya adalah ditetapkannya sekitar 120 butir peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup>K.johnson Rajagukguk, *Proses Penyusunan Rancangan Di Dewan Perwakilan Rakyat*, Jakarta

Dari butir-butir Propenas tersebut disusun apa yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 200 undang-undang yang rencananya akan diselesaikan dalam lima tahun. Kemudian dari Prolegnas dibuat prioritas tahunan RUU yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, yang disebut Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Prolegnas sendiri disusun melalui koordinasi antara DPR yang diwakili Badan Legislasi dan pemerintah yang diwakili oleh Bappenas.

Kemudian proses pembahasannya sama dengan proses pembahasan undang-undang, hanya saja melibatkan seluruh perwakilan komisi yang ada di DPR. Penyusunan Repeta dilakukan oleh pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM) dan Badan Legislasi setelah mendapatkan masukan dari fraksi dan komisi serta dari Sekretariat Jenderal. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun daftar RUU yang akan dimasukkan dalam Repeta: Pertama adalah yang diperintahkan langsung oleh undang-undang, kedua yang ditetapkan oleh Ketetapan MPR, ketiga yang terkait dengan perekonomian nasional, dan yang keempat yang terkait dengan perlindungan terhadap ekonomi sosial. Untuk merespon atas kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, ada batas toleransi 10-20 % untuk membahas RUU di luar yang ditetapkan dalam Repeta. Pengajuan suatu RUU oleh DPR ataupun pemerintah selanjutnya berpedoman pada Repeta yang bersangkutan.

c) Siapa saja Mengusulkan Rancangan Undang-undang

Sebuah RUU dapat berasal dari DPR (usul inisiatif DPR) atau dari pemerintah. Di dalam DPR sendiri ada beberapa badan yang berhak mengajukan RUU, yaitu komisi, gabungan komisi, gabungan fraksi atau badan legislasi. Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang biasanya melakukan proses penyiapan suatu RUU. Sebagai ilustrasi, RUU Komisi Anti Korupsi dipersiapkan oleh Fraksi PPP, sedangkan pada RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (TCP3) dipersiapkan oleh tim asistensi Baleg (Badan Legislasi).<sup>8</sup>

Di samping itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk mempersiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan-badan ini adalah Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (PPPI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan tim perancangsekretariat DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penggodok RUU, baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Baleg misalnya, di samping melakukan sendiri penelitian atas beberapa rancangan undang-undang, juga bekerjasama dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Untuk satu RUU biasanya

---

<sup>8</sup> PSHK, Pusat Study Hukum Dan Ham dan Kebijakan Indonesia

Baleg akan meminta tiga universitas untuk melakukan penelitian dan sosialisasi atas hasil penelitian tersebut.

Baleg juga banyak mendapatkan draft RUU dari masyarakat sipil, misalnya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi dari ICEL (Indonesian Center for Enviromental Law), RUU tentang Kewarganegaraan dari GANDI (Gerakan Anti Diskriminasi) dan RUU Ketenagakerjaan dari Kopbumi. Bagi masyarakat sipil, pintu masuk suatu usulan mungkin lebih terlihat "netral" bila melalui Baleg ketimbang melalui fraksi, karena terkesan tidak terafiliasi dengan partai apapun. Sedangkan PPPI yang memiliki 43 orang peneliti, lebih banyak berfungsi membantu pihak Baleg maupun sekretariat guna mempersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan maupun dalam memberikan pandangan atas RUU yang sedang dibahas. Selain itu PPPI sering juga melakukan riset untuk membantu para anggota DPR dalam melakukan tugas mereka, baik itu untuk fungsi legislasi, pengawasan, maupun budgeter.

Pada tingkat fraksi penyusunan sebuah RUU dimulai dari adanya amanat dari mukatamar partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui DPP maupun DPD partai. Sementara itu, pada RUU usulan pemerintah, tata cara perumusannya diatur dalam Keppres 188 tahun 1998. Prosesnya dimulai dengan penyusunan konsep dan naskah akademis yang diikuti oleh permohonan prakarsa yang dilakukan oleh

departemen teknis atau lembaga non departemen yang terkait. Setelah mendapatkan persetujuan dari presiden barulah dibentuk panitia perancang RUU. Ada model yang hampir sama dalam setiap pembentukan tim perancang undang-undang ini. Ketuanya adalah menteri dari departemen teknis terkait, kemudian tim intinya terdiri dari pejabat eselon I (setingkat dirjen), pejabat dari instansi lain yang akan terkait dengan substansi RUU, serta tokoh atau akademisi yang dianggap memiliki keahlian di bidang tersebut. Sedangkan tim asistensi biasanya melibatkan banyak masyarakat sipil seperti kalangan LSM. Tim perancang ini kemudian akan merumuskan sekaligus mengonsultasikan rancangan tersebut kepada publik.

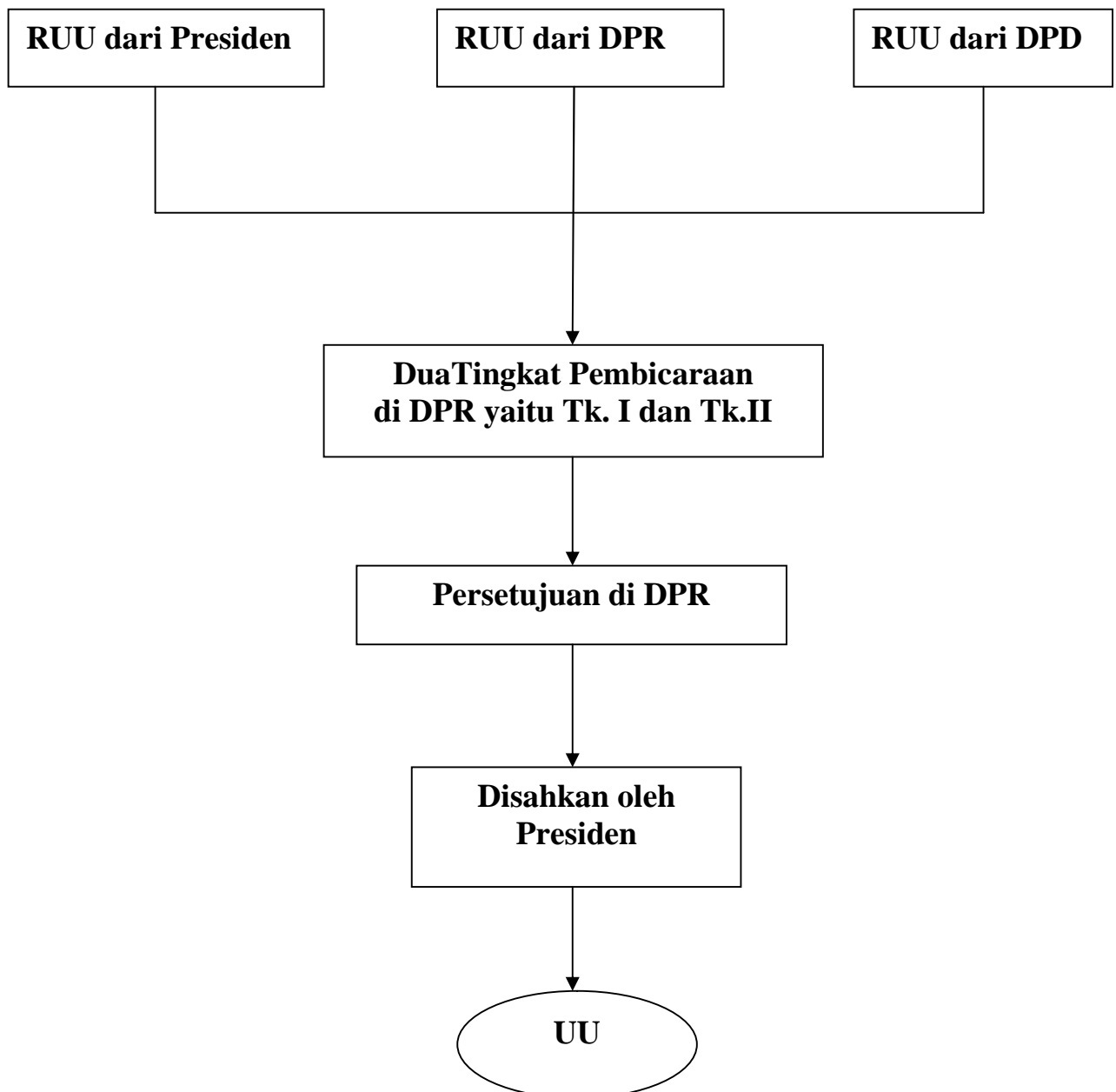
DPR maupun pemerintah tidak mengkavling-kavling RUU mana saja yang akan diusulkan oleh pemerintah dan RUU mana yang akan diusulkan oleh DPR. Bisa saja sebuah RUU dikerjakan oleh berbagai pihak, misalnya saja kasus yang pernah terjadi pada paket undang-undang politik. Pada September 2000, pemerintah (Departemen dalam Negeri) telah membentuk tim untuk menyusun paket RUU politik tersebut. RUU tersebut juga telah disosialisasikan ke beberapa daerah di Indonesia. Paralel dengan proses itu, DPR bekerjasama dengan RIDEP juga telah menyusun Paket Undang-undang politik tersebut. Ironisnya pada saat pemerintah mengajukan RUU tersebut ke DPR pada 29 Mei 2002 dengan Amanat Presiden No. R.06/PU/V/2002 (untuk RUU Partai Politik) dan No. R.07/PU/V/2002 (untuk RUU Pemilu) tidak satupun

dari dua konsep tersebut yang diajukan. Depdagri malah mengajukan konsep baru yang dibentuk oleh tim yang berbeda.

### **Proses Pembahasan Ruu**

Berikut gambaran skema dibawah ini ;

(Pasal 99 Tata tertib DPR)



#### **d) Proses pembahasan RUU**

1. Tata cara rapat diatur pada pasal 99 tatib DPR, RUU dari Pemerintah/Presiden, dari DPR, dan dari DPD di gabungkan,
2. Selanjutnya diatur dengan 2(dua) tingkat pembicaraan di DPR yaitu:

##### **a. Pembicaraan Tingkat Pertama**

Pembicaraan Tingkat Pertama terjadi dalam arena rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat panitia khusus bersama-sama dengan pemerintah.

Tatib tidak menjelaskan proses dan kriteria penentuan badan atau alat kelengkapan DPR mana (apakah komisi, gabungan komisi ataukah pansus) yang akan membahas suatu rancangan undang-undang bersama pemerintah. Menurut keterangan Zein Badjeber, proses tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Bamus. Bamus juga menetapkan sendiri kriteria penentuan apakah suatu RUU dibahas oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Pansus, antara lain berdasarkan pertimbangan:

##### **1. Substansi dari undang-undang**

Apabila substansi undang-undang tersebut merupakan gabungan dari berbagai bidang-bidang yang ada di komisi maka dibentuk Pansus atau gabungan komisi. Sedangkan bila hanya mencakup satu bidang saja maka akan dibahas oleh komisi



## **2. Beban kerja masing-masing komisi**

Apabila jadwal suatu komisi terlalu padat maka dibentuklah pansus, akan tetapi bila terlalu banyak pansus dan orang habis dalam pansus-pansus maka dibahas di komisi.

Dalam pembahasan rancangan, Komisi dibantu oleh Sekretaris Komisi untuk merekam, mencatat dan mendokumentasi persidangan atau data, lain dan mengelola dokumentasi korespondensi (termasuk aspirasi masyarakat) yang berhubungan dengan Komisi tersebut. Permohonan untuk melakukan dengar pendapat dengan Komisi diajukan kepada sekretaris Komisi yang meneruskan kepada rapat pimpinan Komisi untuk mengagendakan rapat. Seharusnya Sekretaris Komisi mengelola dan menyerahkan seluruh dokumentasi kepada Bidang Dokumentasi Sekretariat Jendral DPR yang menyimpan seluruh dokumen kelembagaan. Namun sayangnya seringkali dokumen itu tidak sampai ke Bidang Dokumentasi.

Selanjutnya, penting bagi kita untuk memahami proses pembicaraan tingkat pertama. Ada tiga kegiatan yang ada dalam proses ini, yakni:

- 1) Pemandangan umum masing-masing fraksi terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah, atau tanggapan pemerintah terhadap RUU yang berasal dari DPR. Tatib tidak mewajibkan penyampaian dokumen pandangan secara tertulis sebelum agenda rapat, tetapi biasanya dokumen tersebut dibagikan pada saat rapat.

- 2) Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi atau jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan Pemerintah. Tatib tidak mewajibkan penyampaian dokumen pemandangan secara tertulis sebelum agenda rapat seperti halnya di atas. Biasanya dokumen tersebut juga dibagikan pada saat rapat.
- 3) Pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

#### **b. Pembicaraan Tingkat Dua**

Pembicaraan tingkat dua adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Dalam rapat, Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus melaporkan hasil pembicaraan tingkat pertama; lazimnya laporan ini dituangkan secara tertulis dan dibacakan dalam rapat. Jika dipandang perlu (dan lazimnya dilakukan), masing-masing Fraksi melalui anggotanya dapat menyertai catatan sikap Fraksinya.

Tidak jelas apakah masing-masing anggota (bukan Fraksinya) dapat menyampaikan catatan sikap mereka, namun tetap ada peluang untuk menyampaikan catatan individual berisikan catatan penting, keberatan dan perbedaan pendapat yang lazim. Terakhir, Pemerintah dapat menyampaikan sambutan Persetujuan DPR dituangkan dalam surat keputusan DPR dan disampaikan oleh Pimpinan DPR pada

Presiden untuk (disahkan menjadi Undang-undang) dengan tembusan pada Menteri terkait.

Dalam pembahasan diatas dapat dilihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak mempunyai peran lebih terhadap pengajuan usul rancangan undang-undang, sebab RUU yang diajukan DPD hanya sebatas mengusulkan, yang menentukan RUU diterima atau tidak adalah DPR. apabila RUU di terima oleh DPR barulah DPD bisa ikut dalam pembahasan hanya sampai tingkat 1

Rancangan usulan Undang-Undang oleh DPD terkesan masih lemah sebab RUU yang di usulkan oleh DPD harus masuk preosedur lebih lanjut dan diperiksa oleh DPR atas kelayakan RUU usul DPD, dalam prosedur ini membuat perjalanan usul RUU berjalan dengan lambat sampai ke pimpinan DPR dengan demikian RUU usulan DPD bisa saja sampai ataupun tidak sampai kepada pimpinan DPR untuk dilanjutkan menjadi sebuah RUU dan apabila RUU tersebut diterima RUU tersebut berubah menjadi RUU inisiatif DPR, kemudian DPR lah melanjutkan RUU tersebut sampai ketingkat pembahasan dan menjadi Undang-Undang.

## **B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang Tersebut**

Anggota DPR secara faktual dipilih oleh rakyat, namun kewenangannya hanya dibatasi pada proses mengusulkan RUU (rancangan usul undang-undang) dan tidak terlibat dalam persetujuan sebuah RUU. Hal itu dapat memunculkan konflik jika RUU yang dibahas disetujui DPR tidak sesuai dengan usulan DPD.<sup>9</sup>

Penulis akan menjelaskan satu persatu mengenai hambatan yang terjadi dalam pengajuan RUU yang diberikan DPD ke DPR sebagai berikut, khususnya dalam perjalannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami hambatan dengan fungsinya yaitu dapat mengajukan usul rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ialah sebagai berikut:

1. Rancangan undang-undang yang diberikan oleh DPD tidak dibahas oleh DPR.

Dalam lima tahun masa baktinya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menghasilkan 164 rancangan Undang-Undang (RUU), namun tidak satupun RUU itu dibahas oleh DPR. Anggota DPD RI, Junus Syamsuddin, di Kendari mengatakan, usulan RUU tersebut mandeg di DPR karena DPD RI tidak memiliki kekuatan politik dan kewenangan DPD hanya sebatas mengusulkan. "DPD tidak mampu berbuat banyak kalau keputusan pembahasan RUU ada di tangan DPR, padahal anggaran untuk menyusun RUU tersebut juga tidak sedikit.

---

<sup>9</sup>Firmansyah arifin, dkk, *lembaga negara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara, penerbit KRHN, MKRI dan di dukung The Ford Foundation dan USAID*, Jakarta: 2005 h.55

Kalau pun dari 164 RUU itu diakomodir DPR RI, materi RUU tidak secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian yang diserap. Padahal, lanjut dia, RUU yang diusulkan DPD tidak kalah pentingnya dengan inisiatif yang dibuat DPR atau pun yang dibuat oleh pemerintah. "Salah satu contoh, RUU tentang kepelabuhanan. DPR tidak mengesahkan RUU tersebut, tapi yang disahkan undang-undang tentang pelayaran, padahal sebagian isi undang-undang itu diserap dari usulan DPD. Hal ini juga terjadi pada RUU tentang kependudukan," sehingga bahwa nilai tawar DPD di parlemen masih lemah.

Hal senada juga dikatakan anggota DPD RI asal Bengkulu Bambang Soeroso yang mengistilahkan posisi DPD ibaratnya hanya sebagai "teras". "Posisi kita hanya cukup di teras, dan tidak bisa masuk ke dalam," .Oleh karena itu untuk menguatkan posisi tawar DPD di parlemen, DPD sedang melakukan langkah-langkah politik dengan mewacanakan amandemen UUD 1945.

Kita terus menggalang dukungan di seluruh Indonesia untuk amandemen UUD 1945. Dalam perjalanannya, ada suara-suara agar amandemen itu tidak hanya sebatas soal peran DPD, tapi juga isu lainnya. Oleh karena itu, kita mengembangkannya menjadi tidak sekadar peran DPD, tapi juga lembaga pemerintah lain.<sup>10</sup>

2. Kurang responya dari DPR terhadap usulan RUU yang di ajukan DPD.

---

<sup>10</sup>Antara news.com,164 RUU Usulan DPD Tidak Dibahas DPR,kendari:2008

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengeluhkan rendahnya respon DPR terhadap berbagai usulan RUU yang diajukan DPD untuk dibahas lembaga legislatif tersebut. "Dari 12 usul RUU inisiatif DPD, 10 diantaranya diserahkan kepada DPR tetapi yang ditindak lanjuti hanya satu saja." RUU inisiatif DPD yang ditanggapi DPR itu adalah RUU tentang perubahan Perubahan Ketiga atas UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DI Yogyakarta. "Beberapa usul RUU yang menurut hemat kami sangat penting justru belum ditanggapi DPR," seraya mencontohkan RUU itu antara lain tentang kehutanan, agraria dan lembaga keuangan mikro.

Berbeda dengan tanggapan DPR, menurut Ginandjar, pemerintah justru memberikan respon yang cukup positif. DPD secara rutin menyampaikan berbagai pandangan, pendapat dan pertimbangan serta hasil pengawasannya kepada DPR dan pemerintah terkait aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.<sup>11</sup>

Kepentingan yang perlu diakomodasi adalah persoalan hubungan keduanya, antara lembaga perwakilan. Pertama, pengaturan mekanisme penolakan dan penerimaan RUU usulan DPD atau pertimbangan DPD kepada DPR. "Harus jelas, persyaratan, jenis masalah apa saja yang menjadi alasan DPR menolak usulan DPD sehingga DPD dapat mengerti jika usulannya ditolak atau DPR tidak semena-mena menolak usulan DPD.

Selain itu, akan lebih mudah untuk menentukan apakah usulan

---

<sup>11</sup>Artikel, antara news, *Ginandjar Keluhkan Rendahnya Respon DPR Atas RUU Usulan DPD*, Jakarta. 2007

RUU atau pertimbangan DPD dapat diterima atau ditolak. Kedua, pengaturan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU, yang diusulkan DPD atau yang diminta DPR untuk diberikan pertimbangan oleh DPD, hingga tingkat pengambilan keputusan. Dengan demikian ada kesejajaran secara kelembagaan antara DPD dan DPR.<sup>12</sup>

Terkait itu, Hanafi menyarankan DPD segera berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR. Salah satu di antaranya, pengaturan mekanisme penolakan atau penerimaan suatu RUU usul DPD atau pertimbangan DPD kepada DPR. Hanafi menyebutkan harus diatur dengan detail terkait persyaratan, jenis masalah, dan standar penilaian yang bisa menjadi alasan DPR menolak usul DPD. "Dengan begitu, DPD dapat mengerti bahwa usulnya ditolak. DPR juga tidak semena-mena menolak usul DPD.

Dalam tahun 2010, dari target 70 RUU prioritas, DPR hanya mampu menyelesaikan delapan RUU. "Kalau urusan legislasi ini mengajak DPD, khususnya untuk RUU yang berkaitan dengan daerah, kemungkinan bisa delapan RUU kali empat yang selesai. Sekarang ini ibaratnya, dua bersaudara cuma yang kerja baru satu," ujar ketua Kaukus Antikorupsi DPD. Sepanjang 2010, DPD telah menyelesaikan dan menyerahkan kepada

---

<sup>12</sup>Kalimantan News, *DPD RI belum maksimal karena fungsinya terbatas*. Jakarta: 2010

DPD sebanyak tiga RUU usul inisiatif. Salah satu di antaranya adalah RUU Keistimewaan Jogjakarta.<sup>13</sup>

Secara terpisah, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD I Wayan Sudhirta mengatakan, peran legislasi DPD memang terkesan masih dipandang sebelah mata oleh DPR. Kalau usul RUU dari DPD tidak disetujui, RUU tersebut seolah diabaikan begitu saja. Tidak ada feedback apa pun dari DPR.

Sebaliknya, kalau disetujui, RUU tersebut harus berganti baju menjadi RUU usul inisiatif DPR. "Ini juga ikut membuat semangat DPD berkurang," kata senator dari Bali itu. Karena itu, selain mempermudah syarat pengajuan RUU di internal DPD, Wayan menyatakan bahwa sinkronisasi tata tertib DPR dan DPD juga urgen. Menurut dia, setahun terakhir ini sebenarnya DPD sudah mencoba berkoordinasi dengan DPR. Hanya belum ada respons serius dari DPR. "Selama ini RUU yang diajukan DPD jatuhnya ke komisi atau disimpan di laci. Kami yang ada di DPD tidak pernah tahu. Seharusnya ada surat resmi yang berisi tanggapan dari DPR." kuncinya adalah ada atau tidaknya kemauan politik dari DPR. Dia optimistis, pelibatan DPD secara optimal justru akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target legislasi parlemen.

---

<sup>13</sup><http://www.m.facebook.com> ,DPD masih di persulit usul ruu jakarta:2011



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat benang merah sebagai kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pengajuan usulan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah oleh DPD harus masuk prosedur pemeriksaan kelayakan RUU sebelum sampai ke pimpinan pada tahapan ini membuat RUU tersebut berjalan lambat sehingga bisa jadi RUU yang diajukan oleh DPD sampai ke pimpinan DPR atau pun tidak, agar dapat berjalan lancar DPR juga memberikan jalan yang mudah kepada DPD agar kinerja dari sebuah lembaga ini berjalan dengan maksimal serta merubah persepsi yang telah beredar saat ini bahwa DPD hanya sebagai teras dan tidak bisa masuk kedalam.
2. hambatan dan yang harus diakomodasi adalah persoalan hubungan keduanya antara lembaga perwakilan yakni persoalan pengaturan mekanisme penolakan dan penerimaan RUU usulan DPD kepada DPR, harus diatur dengan detail terkait persyaratan, jenis masalah, standar penilaian yang bisa menjadi alasan DPR menolak usul DPD dengan begitu DPD dapat mengerti bahwa usulan ditolak dan DPR juga tidak semena-mena menolak usul DPD.

## **B. Saran**

Adapun yang dapat penulis sarankan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia DPD segeralah berkoordinasi dengan DPR untuk membuat tatib bersama agar kepentingan DPD dalam menjalankan tugas-tugas legislasinya itu dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target legislasi parlemen.
2. Hendaknya DPR juga memberi kejelasan kepada DPD apakah RUU yang diajukan oleh DPD ditolak dan standar penilaian yang bisa menjadi alasan DPR menolak usul DPD. Dengan begitu, DPD dapat mengerti bahwa usulnya ditolak dan bisa memperbaiki kesalahannya dalam pengajuan usul RUU berikutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Yuhana, 2007. System ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945, focusmedia bandung.
- Antara news.com, 2008. 164 RUU Usulan DPD Tidak Dibahas DPR, Kendari.
- Artikel, antara news, 2007. Ginandjar Keluhkan Rendahnya Respon DPR Atas RUU Usulan DPD, Jakarta.
- Bambang Cipto, 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, hal.37
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodelogi penelitian hukum*, raja grafindo persada, Jakarta:1997
- Bivintri Susantu, Herni Sri Nurbayanti dan Fajri Nursyamsi, 2007. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta.
- Dahlan thaib, 1999. Kedaulatan rakyat, negara hukum dan konstitusi, liberty, Yogyakarta.
- Dr.J.Kaloh, 2007., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, dkk, 2005. Lembaga negara dan sengketa kewenangan antar lembaga negara, penerbit KRHN, MKRI dan di dukung The Ford Foundation dan USAID, Jakarta.
- Indra J. Piliang, Bivtri Susanti, 2006. Untuk apa DPD RI, kelompok DPD RI di MPR, Jakarta.
- Indra J. Piliang, Bivintri Susanti, 2007. Untuk apa DPD RI, kelompok DPD RI di MPR RI, Jakarta.
- J. Van den Doe, 1988. *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, Erlangga, Jakarta, hal.90
- Jhon Pieres, Aryanti Baramuli Putri, 2006. Dewan Perwakilan Daerah; *studi analisis, kritik dan solusi kajian hukum politik*, pelangi cindekia, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2007. *Pokok-pokok hukum tata negara indonesia*, PT Bhuana ilmu populer, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- K..Johnson Raja Gukguk, 2006. Proses penyusunan rancangan di dewan perwakilan rakyat. Jakarta.

Kalimantan news, 2010. DPD RI belum maksimal karena fungsinya terbatas. Jakarta.

Maria Farida Indrati .*Ilmu Perundang-Undangan*, jakarta, PT bhuana ilmu populer,2007

Miriam Budiardjo, 1997. *Dasar-Dasa*<sup>61</sup> *Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.

Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim., 1983.*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi Hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia dan CV. Sinar bakti*, Jakarta.

Moh.mahmud MD., 1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama media, Yogyakarta.

MPR RI, 2003. “*Panduan dalam memasyarakatkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*”.latar belakang,proses dan hasil perubahan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Sekretariat Jendral MPR RI ,hal.180 dalam jhon pieris,op cit.

PHSK,” 2012. *Pusat studi hukum dan kebijakan indonesia*”,(terakhir di kunjungin tanggal 3 maret).

Soehino, 1996. *Ilmu negara*, Liberty,Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*,PT. Raja grafindo persada, Jakarta.

Sudargo Grautama, 1973. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Alumni, bandung.

Sulardi, 2002.*Aspek Hukum Sistem Bikameral di Indonesia*”, Surya, Rabu 9 Oktober .

Undang-undang no 27 t1hun 2009

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,pasal 22D

www.parlemen.net.com, (terakhir di kunjungin tanggal 2 maret 2012)

,DPD masih di persulit usul ruu jakarta:2011

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tahunn, 2005

Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tahun 2009-2010

[www.m.facebook.com](http://www.m.facebook.com)